

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, perekonomian Indonesia menjadi salah satu hal penting dalam menunjang kebutuhan negara. Tentunya dalam hal ini pendapatan negara menjadi salah satu hal penting dalam perekonomian Indonesia. Sumber pendapatan negara itu sendiri merupakan dana yang diterima negara untuk melakukan pembiayaan pembangunan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sumber pendapatan negara berasal dari penerimaan negara berupa penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri.

Untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang baik kualitas laporan keuangan menjadi hal utama dalam penerimaan dan penggunaan dana pemerintah. Laporan keuangan yang dihasilkan tentunya harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan dapat diartikan sebagai catatan informasi keuangan suatu organisasi/ instansi pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja organisasi/ instansi tersebut. Dalam hal ini Instansi pemerintah yang menjadi sumber pendapatan negara non pajak selain BUMN salah satunya adalah Perguruan Tinggi Negeri.

Perguruan tinggi merupakan suatu penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai tingkat lanjut dari jenjang pendidikan menengah dijalur pendidikan formal. Hal ini sesuai dengan pengertian perguruan tinggi menurut UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 19 ayat 1 yang menyatakan bahwa perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah mencakup program pendidikan Diploma, Sarjana, Megister, Spesialis dan Doktor yang diselenggarakan oleh perguruan

tinggi. Perguruan tinggi yang ada di Indonesia dapat berbentuk Politeknik, Sekolah Tinggi, Akademik, Universitas dan Institut.

Perguruan tinggi merupakan salah satu institusi yang berperan dalam praktik pendidikan. Institusi perguruan tinggi memiliki keistimewaan dibanding institusi lain terletak pada fungsi dasarnya yaitu dalam hal pendidikan, pengajaran dan usaha penemuan atau inovasi (riset). Fungsi-fungsi inilah yang kemudian mendefinisikan peranan perguruan tinggi dalam masyarakat. Wacana yang kemudian sering mengemuka dalam penyelenggaraan perguruan tinggi kemudian adalah mengenai *academic excellence* dan manajemen perguruan tinggi, termasuk dalam hal pembiayaan.

Mengelola keuangan di perguruan tinggi bukanlah menjadi hal yang mudah, masalah mendasar yang terjadi di perguruan tinggi adalah pengelolaan keuangan masih dengan cara manual dimana masih menggunakan kertas, buku-buku jurnal, dan aplikasi umum seperti Microsoft excel, sehingga perguruan tinggi masih mengalami kesulitan dalam melakukan kontrol dan validasi pencatatan pada anggaran. Sedangkan masalah lain yang menjadi hal penting di perguruan tinggi yaitu realisasi anggaran yang tidak transparan, sehingga dengan pengelolaan yang tidak transparan menyebabkan kemungkinan adanya kecurangan dan kecurigaan pada masyarakat umum dan mahasiswa/i pada perguruan tinggi tersebut. Untuk itu, untuk mengatasi masalah tersebut salah satunya adalah penerapan penggunaan aplikasi atau sistem informasi yang tepat guna pada instansi-instansi perguruan tinggi yang ada. (Sevima, 2020)

Sebagai salah satu instansi pemerintah tentunya Perguruan Tinggi Negeri juga dituntut untuk dapat memenuhi *Good University Governance* yang merupakan penerapan *Good Corporate Governance* dalam tujuan meningkatkan kualitas aspek Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Keadilan. *Good University Governance* itu sendiri diyakini mampu mengurangi munculnya fraud. Yang dalam hal ini seperti meningkatkan pengawasan dan pertanggungjawaban salah satu pengelolaan keuangan, sehingga dengan ini juga diharapkan perguruan tinggi negeri dapat mengatasi isu permasalahan yang ada.

Pada tahun 2018 Pemerintah Indonesia tengah menggalakkan program revolusi industri 4.0. Tujuan dari program revolusi industry 4.0 itu sendiri untuk mendorong ekonomi Indonesia masuk ke dalam 10 besar dunia di tahun 2030. Revolusi industri ini merupakan generasi ke-4 yang memiliki skala, ruang lingkup, dan kompleksitas yang lebih luas dibanding sebelumnya. Revolusi industri dimulai sejak abad ke-18 untuk mengembangkan industry kreatif. Adapun, bidang-bidang yang mengalami terobosan dengan munculnya teknologi baru, adalah robot kecerdasan buatan, teknologi nano, bioteknologi, teknologi komputer kuantum, blockchain, teknologi berbasis internet, dan printer 3D. (Detik, 2020)

Pesatnya perkembangan teknologi di era revolusi industry 4.0 sangat berpengaruh terhadap karakteristek pekerjaan yang ada saat ini, dimana ketrampilan dan kompetensi menjadi hal pokok yang perlu diperhatikan. Karena di era revolusi industry 4.0 integrasi pemanfaatan teknologi serta internet yang begitu canggih dan masif juga sangat mempengaruhi adanya perubahan perilaku dunia usaha dan dunia industri, perilaku masyarakat dan konsumen pada umumnya. Karakteristik di era revolusi indsutri tersebut meliputi digitalisasi, optimisasi dan *costumization* produksi, otomasi dan adaptasi, interaksi antara manusia dengan mesin, *value added services dan business, automatic data exchange dan communication*, serta penggunaan teknologi informasi.

Oleh karena itu, dunia pendidikan dan industri harus mampu mengembangkan strategi transformasi industry dengan mempertimbangkan sektor sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidangnya. Menurut Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohommad Nasir menyampaikan bahwa tantangan revolusi industry 4.0 harus direspon secara cepat dan tepat oleh seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Kemenristekdikti agar mampu meningkatkan daya saing bangsa Indonesia di tengah persaingan. (Sevima, 2020)

Salah satu program yang dilakukan pemerintah dalam mendukung revolusi industry 4.0 itu sendiri adalah penggunaan Sistem Informasi Manajemen pada Instansi Pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan terintegrasi satu sama lain dengan baik, yang tentunya dalam hal ini memberikan manfaat pula pada penyimpanan data yang lebih terseruktur dengan

baik dan pengurangan penggunaan dokumen fisik yang masih banyak memiliki kekurangan. Sehingga pemerintah yang dalam hal ini pada unit eselon 1 telah menerapkan penggunaan beberapa aplikasi Sistem Informasi Manajemen untuk digunakan pada instansi-instansi yang dinaunginya, salah satunya yang digunakan oleh Perguruan Tinggi Negeri adalah SAS (Sistem Aplikasi Satker), SAIBA (Sistem Aplikasi Satker), Aplikasi RKAK/L (Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga), dan yang paling baru saat ini digunakan dan masih terus berkembang adalah SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi).

Dengan adanya Sistem informasi manajemen yang diterapkan pada instansi pemerintah terutama pada hal ini Perguruan Tinggi Negeri diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja dan kualitas laporan keuangan yang ada, baik mulai dalam perencanaan, penganggaran dan pengawasan.

Bicara mengenai perencanaan dan penganggaran proses penyelenggaraan perguruan tinggi negeri yang dikelola oleh pemerintah dalam hal ini diatur dengan menggunakan sumber dana APBN, sedangkan perguruan tinggi swasta dikelola dengan menggunakan sumber dana dari masyarakat (UU No. 20 Tahun 2003). Berdasarkan pernyataan tersebut perguruan tinggi tentunya harus mampu melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana / laporan keuangannya dalam proses penyelenggaraannya, yang dalam hal ini pengawasan internal memiliki peran penting dalam kualitas laporan keuangan yang akan dilaporkan nantinya.

Untuk mewujudkan pengelolaan tata kelola Perguruan Tinggi Negeri yang berkualitas dan berakuntabilitas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menguatkan peran pengawasan internal, melalui Satuan Pengawasan Internal (SPI) pada PTN dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) di seluruh Indonesia. Kesamaan persepsi tentang penyelesaian masalah-masalah dalam lingkup pendidikan tinggi dan semakin pentingnya peran pengawasan internal oleh Inspektorat Jenderal dalam lingkup Kementerian dan Satuan Pengawasan Intern (SPI) di lingkup satuan kerja dapat lebih ditingkatkan guna mewujudkan penguatan tata kelola pendidikan tinggi yang dilandasi kebijakan Kampus Merdeka. Peran pengawasan internal untuk menguatkan tata kelola perguruan tinggi oleh Inspektorat Jenderal dalam lingkup Kementerian dan SPI di

lingkup satuan kerja harus terjalin dengan baik, sesuai dengan peran SPI yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2017. (Kemendikbud, 2020)

Dengan program yang dilakukan Kemendikbud dalam menguatkan peran pengawasan internal tentunya diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang ada pada Perguruan Tinggi Negeri. Sebagai salah satu instansi pemerintah tentunya Perguruan Tinggi Negeri juga memiliki peran dan tuntutan akuntabilitas dan transparansi sebagai pemegang amanah. Mardiasmo (2002) menjelaskan bahwa: Akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak untuk meminta pertanggung-jawaban tersebut. Selain itu, menurut Mardiasmo (2004) juga menyebutkan bahwa “Akuntabilitas merupakan pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya lebih jauh”.

Sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan anggaran pendidikan dan kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyelenggarakan rapat koordinasi (Rakor) pengelolaan keuangan dengan tema “Strategi Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan Akuntabilitas Kinerja”. Melalui penyelenggaran Rakor Keuangan ini diharapkan dapat membangun komitmen para pengelola keuangan di lingkungan Kemendikbud dalam mempercepat pelaksanaan program dan anggaran dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas. Selanjutnya, mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan, melalui penerapan disiplin akuntansi dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan kaidah manajemen yang baik. (Kemendikbud, 2019)

Berdasarkan rakor tersebut maka dapat dikatakan akuntabilitas juga memiliki peran pada kualitas laporan keuangan. Sedangkan akuntabilitas di dalam pengelolaan keuangan itu sendiri dapat diartikan bahwa penggunaan uang perguruan tinggi dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan

peraturan yang berlaku, maka perguruan tinggi membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu (1) adanya transparansi para penyelenggara perguruan tinggi dengan menerima masukan dan mengikut sertakan berbagai komponen dalam mengelola perguruan tinggi, (2) adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, (3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat.

Alasan penulis melakukan penelitian di perguruan tinggi negeri karena perguruan tinggi negeri merupakan pusat Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sumber dananya berasal dari APBN. Sebagai salah satu instansi pemerintah tentunya kualitas laporan keuangan menjadi hal penting atas kualitas penggunaan anggarannya, serta pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat terhadap transparansi laporan keuangan atau penggunaan anggaran yang ada di perguruan tinggi negeri. Dengan adanya tantangan perguruan tinggi di Era Revolusi Industri 4.0 pada tahun 2018 yang telah berjalan selama 2 tahun ini serta adanya program dari Kemendikbud tentang peningkatan pengawasan internal diharapkan dapat menghasilkan output yang baik khususnya sistem informasi manajemen dan pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan, dan dengan adanya program dari Kemendikbud tentang peningkatan kualitas akuntabilitas diharapkan pula dapat menguatkan hubungan antara sistem informasi manajemen dan pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan yang ada di perguruan tinggi negeri terutama di lingkungan Bandar Lampung yang terdata terdiri dari Universitas Lampung (UNILA), IAIN Raden Intan, POLINELA, dan Institut Teknologi Sumatera (ITERA).

Penelitian ini mereplikasi penelitian Irwati, Salju & Hapid (2017) yang berjudul Pengaruh Sistem Informasi Manajemen terhadap kualitas laporan keuangan di PT.Telkom. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menambahkan variable ini dengan penelitian terdahulu yaitu penambahan variable akuntabilitas sebagai variable moderasi yang diambil dari penelitian Made,

Kadek & Adi (2017) yang menemukan bahwa akuntabilitas memoderasi hubungan motivasi pelayanan publik dan kualitas sistem informasi keuangan terhadap kinerja. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN AKUNTABILITAS SEBAGAI VARIABLE MODERASI (STUDI KASUS PERGURUAN TINGGI NEGERI BANDAR LAMPUNG)

1.2. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memfokuskan penelitian ini agar mempunyai ruang lingkup dan arah penelitian yang jelas, pembatasan masalah merupakan hal yang harus dilakukan. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah Penelitian pada perguruan tinggi negeri Bandar Lampung.

1.3. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan dalam membahas masalah, penulis mencoba merumuskan permasalahan :

1. Apakah Sistem Informasi Manajemen mempengaruhi kualitas laporan keuangan di Perguruan Tinggi Negeri Bandar Lampung ?
2. Apakah Pengendalian Intern mempengaruhi kualitas laporan keuangan di Perguruan Tinggi Negeri Bandar Lampung ?
3. Apakah Akuntabilitas memoderasi pengaruh sistem informasi manajemen terhadap kualitas laporan keuangan di Perguruan Tinggi Negeri Bandar Lampung ?
4. Apakah Akuntabilitas memoderasi pengaruh Pengendalian Intern terhadap kualitas laporan keuangan di Perguruan Tinggi Negeri Bandar Lampung ?

1.4. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh penerapan sistem informasi manajemen terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Untuk membuktikan secara empiris apakah akuntabilitas memoderasi pengaruh sistem informasi manajemen terhadap kualitas laporan keuangan.
4. Untuk membuktikan secara empiris apakah akuntabilitas memoderasi pengaruh pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan di Perguruan Tinggi Negeri Bandar Lampung.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis dan juga berguna bagi dunia pendidikan khususnya ilmu pengetahuan mata kuliah akuntansi manajemen sektor publik dan bisa dipakai sebagai bahan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak perusahaan dalam hal ini adalah instansi pemerintah di bidang pendidikan yaitu perguruan tinggi di Bandar Lampung dalam rangka pengetahuan untuk meningkatkan kualitas layanan di perguruan tinggi pemerintah dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prima. Dan mewujudkan praktik pengelolaan keuangan yang cepat, tepat, akurat dan transparan.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka yang memuat literatur terkait dengan topik penelitian kaitan variabel independen dengan variabel dependen, kerangka pemikiran, pengembangan hipotesis.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang desain penelitian, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel data, metode pengumpulan datavariabel penelitian dan pengukurannya, metode analisis data yang terdiri dari statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan

Bab ini menguraikan analisis deskriptif data, pengujian hipotesis dan pembahasan hasil analisis.

BAB V: Simpulan dan Saran

Bab ini membahas kesimpulan mengenai obyek yang diteliti berdasarkan hasil analisis data, menjelaskan mengenai keterbatasan penelitian dan memberikan saran bagi pihak yang terkait, serta rekomendasi bagi peneliti berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN